

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peran sektor investasi menjadi sangat krusial karena beriringan dengan tuntutan peningkatan daya saing, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi tidak hanya mendorong akumulasi modal, tetapi juga dapat mendorong kemajuan dan inovasi bagi alih teknologi, peningkatan produktivitas, serta memperkuat kapasitas produksi nasional (Todaro & Smith, 2015). Menurut Mankiw (2020), investasi adalah salah satu komponen utama dalam Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga fluktuasi investasi sangat memengaruhi performa makroekonomi suatu negara.

Secara teori, investasi sangat berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan akumulasi modal melalui investasi akan memperluas kapasitas produksi suatu daerah. Menurut teori pertumbuhan Harrod- Domar, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila terdapat peningkatan investasi yang cukup untuk menggantikan depresiasi modal dan menciptakan tambahan output baru. Dengan demikian, peningkatan investasi bukan hanya sekedar meningkatkan volume produksi, tetapi juga mendorong inovasi, produktivitas, serta daya saing daerah.

Di Indonesia, investasi dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN merupakan bentuk komitmen modal dari pelaku usaha domestik yang berasal dari dalam negeri. Kontribusi PMDN memiliki arti penting karena

mencerminkan tingkat kepercayaan investor lokal terhadap iklim usaha, kepastian hukum, dan kesiapan infrastruktur di dalam negeri. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai realisasi PMDN nasional terus meningkat pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2022, total realisasi PMDN mencapai Rp 552,8 triliun, meningkat sebesar 23,6% dibandingkan tahun sebelumnya (BKPM, 2023). Tren positif ini menunjukkan bahwa PMDN memainkan peran yang semakin strategis dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, Provinsi Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Berdasarkan data BPS (2023), Jawa Timur menyumbang lebih dari 14% PDRB nasional, menempatkannya di posisi kedua setelah DKI Jakarta. Struktur ekonomi Jawa Timur sangat beragam, ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pertanian, serta konstruksi.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia, Jawa Timur memiliki pelabuhan internasional (Tanjung Perak), jaringan tol Trans Jawa, dan infrastruktur energi yang terus dikembangkan untuk mendukung aktivitas ekonomi regional.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Sebagai provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar kedua setelah DKI Jakarta, Jawa Timur menyumbang sekitar 14-15 persen terhadap produk domestik bruto nasional. Posisi geografis yang strategis di wilayah timur Pulau Jawa menjadikan provinsi ini sebagai pusat perdagangan, industri, dan logistik nasional. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki jaringan

infrastruktur transportasi dan energi yang relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar provinsi lain di Indonesia, seperti keberadaan pelabuhan internasional Tanjung Peral, kawasan industri di Gresik, Pasuruan, dan Sidoarjo, serta pembangunan jalan tol Trans Jawa yang memperkuat konektivitas antar wilayah. Kondisi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu daerah tujuan investasi yang potensial, baik bagi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Namun demikian, perkembangan investasi di Jawa Timur selama beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2024), realisasi investasi di Jawa Timur mengalami peningkatan dari Rp 166,3 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 188,1 triliun pada tahun 2023. Walaupun mengalami tren kenaikan, laju pertumbuhan investasi di Jawa Timur relatif lebih lambat dibandingkan dengan beberapa provinsi lain seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa Jawa Timur masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya tarik investasinya secara berkelanjutan, terutama dari sisi produktivitas tenaga kerja, kualitas infrastruktur, dan efisiensi birokrasi daerah. Selain itu, struktur investasi di Jawa Timur masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan perdagangan besar dan menengah, sementara sektor padat karya seperti pertanian, perikanan, dan industri kecil menengah masih memiliki kontribusi yang terbatas terhadap total investasi. Padahal, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, terutama di wilayah pedesaan pinggiran kota. Ketimpangan distribusi investasi antarwilayah juga menjadi perhatian, karena sebagian besar investasi masih terkonsentrasi di kawasan relatif tertinggal dalam

penerimaan arus modal.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa meskipun secara agregat Jawa Timur memiliki potensi investasi yang besar, namun masih terdapat kesenjangan antara potensi sumber daya yang tersedia dan realisasi investasi yang optimal. Kondisi tersebut menjadikan kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Jawa Timur menjadi penting untuk diteliti. Dalam berbagai literatur pembangunan ekonomi, infrastruktur fisik seperti listrik dan jalan seringkali dikaitkan erat dengan kemudahan berusaha dan efisiensi operasional perusahaan.

Listrik merupakan kebutuhan dasar yang mendukung keberlangsungan aktivitas industri, perdagangan, dan jasa, sementara jalan berperan sebagai penghubung vital dalam distribusi barang dan mobilitas tenaga kerja. Dalam konteks ini, infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai elemen pelengkap, tetapi juga sebagai prasyarat penting bagi pertumbuhan investasi di daerah.

Di samping itu, kapasitas fiskal pemerintah daerah yang tercermin dari pendapatan asli daerah (PAD) juga turut memainkan peran penting. Semakin tinggi PAD yang dimiliki suatu daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik, membangun infrastruktur tambahan, serta menciptakan insentif fiskal yang mendorong aktivitas investasi. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah aspek tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja yang produktif, terampil, dan berpendidikan merupakan daya tarik bagi investor. Daerah dengan tenaga kerja yang banyak dan berkualitas akan memiliki keunggulan yang kompetitif dalam menarik investasi, karena dapat menjamin efisiensi biaya tenaga kerja dan kelancaran proses produksi.

Berdasarkan data grafik yang tersedia, keempat variabel tersebut menunjukkan

tren yang positif selama periode 2018 hingga 2023. Jumlah energi listrik yang didistribusikan meningkat dari sekitar 27.000 *gigawatt hour* menjadi lebih dari 40.000 *gigawatt hour*, sementara panjang jalan yang tercatat di Provinsi Jawa Timur bertambah dari sekitar 41.000 kilometer menjadi hampir 42.800 kilometer. Pendapatan asli daerah mengalami lonjakan yang sangat signifikan, dari sekitar Rp15 triliun menjadi lebih dari Rp45 triliun. TPAK pun menunjukkan pertumbuhan pesat, dari kurang lebih 800 ribu unit usaha menjadi mendekati 1,2 juta unit. Pertumbuhan yang serempak dari berbagai indikator tersebut menjadi landasan penting untuk mengkaji keterkaitannya dengan peningkatan investasi domestik di provinsi ini.

Meskipun demikian, sejauh mana hubungan antara infrastruktur, kapasitas fiskal, serta dinamika ketenagakerjaan dengan investasi domestik belum sepenuhnya jelas. Belum banyak penelitian yang secara spesifik memfokuskan diri pada konteks Jawa Timur dan mengevaluasi secara kuantitatif pengaruh variabel- variabel tersebut terhadap PMDN secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilaksanakan, dengan tujuan utama untuk menganalisis pengaruh infrastruktur listrik, infrastruktur jalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Timur selama periode 2018 hingga 2023. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah serta penguatan iklim investasi berbasis data.

Infrastruktur listrik merupakan salah satu komponen fundamental dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Listrik tidak hanya

menjadi kebutuhan dasar rumah tangga, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi aktivitas industri, perdagangan, jasa, dan sektor produktif lainnya. Tanpa ketersediaan energi listrik yang memadai, produktivitas ekonomi akan terhambat, biaya operasional meningkat, dan daya saing suatu wilayah dalam menarik investasi akan menurun. Menurut teori pertumbuhan endogen yang dikemukakan oleh Romer (1990), kemajuan teknologi dan kualitas infrastruktur menjadi faktor internal utama yang mendorong pertumbuhan jangka panjang. Dalam konteks ini, listrik menjadi penopang penting bagi adopsi teknologi, efisiensi produksi, serta keberlangsungan aktivitas usaha secara keseluruhan.

Secara nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan target peningkatan rasio elektrifikasi dan kapasitas pembangkit listrik untuk menjamin keamanan energi. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi industri dengan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi, juga mengalami peningkatan kebutuhan dan konsumsi energi listrik setiap tahunnya. Berdasarkan grafik yang telah disediakan, jumlah energi listrik yang didistribusikan di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, khususnya dalam periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, total distribusi listrik tercatat sekitar 27.000 GWh dan terus meningkat hingga mencapai lebih dari 40.000 GWh pada tahun 2023. Lonjakan ini menunjukkan bahwa selain kebutuhan konsumsi yang meningkat, pemerintah daerah dan PT PLN telah melakukan ekspansi kapasitas jaringan dan pembangkit yang lebih luas untuk mendukung aktivitas ekonomi yang terus tumbuh.

Peningkatan distribusi listrik di Jawa Timur juga dapat diartikan sebagai sinyal positif bagi para investor. Ketersediaan listrik yang stabil dan mencukupi merupakan faktor penting dalam pemilihan lokasi investasi, terutama untuk sektor

industri pengolahan, manufaktur, dan perdagangan modern. Beberapa kawasan industri seperti Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto membutuhkan pasokan listrik yang besar untuk menunjang aktivitas produksi. Selain itu, investor cenderung menghindari wilayah yang memiliki risiko padam listrik tinggi atau keterbatasan akses terhadap jaringan listrik nasional. Oleh karena itu, perbaikan dan perluasan infrastruktur listrik dapat secara langsung meningkatkan daya saing daerah sebagai tujuan investasi.

Meskipun demikian, tantangan distribusi listrik masih ada di beberapa wilayah pinggiran dan kepulauan di Jawa Timur, seperti di wilayah tapal kuda atau pulau-pulau kecil di Madura dan Bawean. Ketimpangan dalam akses energi ini menjadi catatan penting dalam upaya menciptakan pemerataan pembangunan dan investasi.

Dengan demikian, ketersediaan dan pemerataan infrastruktur listrik tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga isu strategis dalam menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kapasitas daerah untuk menarik penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji apakah peningkatan distribusi listrik benar-benar berkontribusi terhadap naiknya nilai PMDN di Provinsi Jawa Timur selama enam tahun terakhir. Infrastruktur jalan merupakan salah satu unsur vital dalam pembangunan ekonomi daerah karena berfungsi sebagai penghubung utama antarwilayah, antaraktivitas produksi, serta antara produsen dan konsumen. Jalan yang memadai tidak hanya memudahkan mobilitas barang dan orang, tetapi juga menurunkan biaya logistik, meningkatkan efisiensi distribusi, dan memperluas jangkauan pasar. Menurut teori lokasi industri yang dikembangkan oleh Alfred Weber (1909), pemilihan lokasi industri dan aktivitas usaha sangat ditentukan oleh faktor biaya

transportasi.

Semakin rendah biaya tersebut, maka semakin tinggi insentif bagi pelaku usaha untuk menanamkan modal di suatu wilayah. Oleh karena itu, keberadaan jaringan jalan yang baik menjadi salah satu faktor strategis dalam menarik investasi domestik.

Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di tingkat daerah juga menjadi prioritas dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola jaringan jalan provinsi, kabupaten, dan kota, serta mengintegrasikannya dengan sistem logistik nasional. Jalan yang terhubung dengan kawasan industri, pelabuhan, bandara, dan pusat distribusi regional memberikan nilai tambah bagi suatu wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif. Dalam konteks ini, infrastruktur jalan tidak hanya berfungsi sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan ekonomi daerah yang mendukung arus barang dan modal.

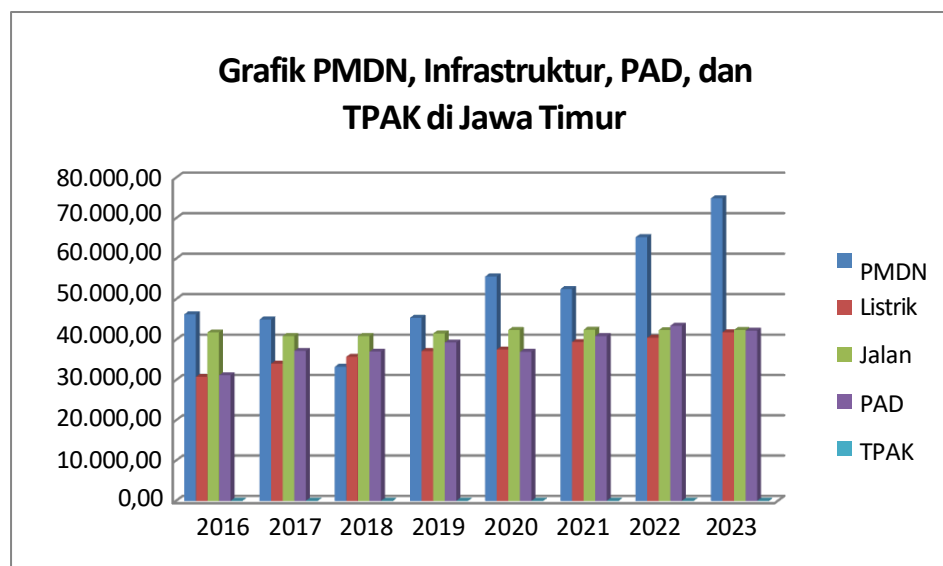
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah dengan sistem transportasi darat yang paling berkembang di Indonesia, khususnya dengan adanya jaringan jalan tol Trans Jawa yang menghubungkan Surabaya dengan daerah-daerah industri seperti Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, hingga ke perbatasan Jawa Tengah. Berdasarkan grafik yang kamu lampirkan, panjang jalan di Jawa Timur mengalami pertumbuhan meskipun secara bertahap. Pada tahun 2018, total panjang jalan mencapai sekitar 41.000 kilometer dan meningkat menjadi sekitar 42.800 kilometer pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya ekspansi jaringan jalan, baik jalan provinsi maupun kabupaten/kota, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas konektivitas antarwilayah dan

mendukung kegiatan ekonomi.

Meski pertumbuhan panjang jalan tampak moderat jika dibandingkan dengan variabel lain, namun perlu disadari bahwa pembangunan jalan bersifat jangka panjang dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, kualitas jalan dan keterhubungannya dengan pusat-pusat ekonomi lebih menentukan daripada sekadar panjang fisiknya. Dalam beberapa studi, disebutkan bahwa daerah dengan akses jalan yang baik cenderung memiliki tingkat investasi yang lebih tinggi karena menurunkan risiko keterlambatan, kerusakan barang, dan biaya transportasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis apakah peningkatan panjang jalan yang terjadi di Jawa Timur selama periode 2018–2023 memberikan dampak signifikan terhadap realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah tersebut.

Gambar 1. 1

Grafik PMDN, Infrastruktur, PAD, dan TPAK di Jawa Timur Tahun 2016-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur (Data Diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan utama yang

mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah dalam membiayai pembangunan serta menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Dalam sistem desentralisasi fiskal yang berlaku di Indonesia, PAD berperan penting untuk mendukung otonomi daerah agar tidak terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka semakin besar pula ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pembangunan, termasuk dalam penyediaan infrastruktur, insentif investasi, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Menurut Musgrave dan Musgrave (1989), salah satu fungsi utama keuangan publik adalah fungsi alokasi, di mana pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal, dan PAD menjadi instrumen utama untuk mendanai fungsi tersebut.

Dalam konteks ekonomi daerah, PAD bukan hanya ukuran dari pendapatan yang dikumpulkan, tetapi juga mencerminkan kapasitas institusional dan daya kelola pemerintah daerah. PAD yang kuat sering dikaitkan dengan tata kelola keuangan daerah yang baik, kinerja pelayanan publik yang efisien, serta kebijakan fiskal yang pro-investasi. Oleh karena itu, PAD dapat berfungsi sebagai sinyal kepercayaan kepada investor bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil. Salah satu bentuk dukungan itu adalah pembangunan infrastruktur pendukung investasi seperti jalan, kawasan industri, perizinan terpadu, serta promosi ekonomi daerah. Dalam literatur ekonomi pembangunan, hubungan antara PAD dan investasi domestik seringkali dijelaskan melalui teori Keynesian yang menekankan bahwa belanja pemerintah, yang salah satunya bersumber dari PAD, dapat menciptakan efek pengganda terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi (Keynes, 1936).

Data yang tercantum dalam grafik menunjukkan bahwa PAD Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, PAD berada pada kisaran Rp 15 triliun dan terus meningkat hingga mencapai lebih dari Rp 45 triliun pada tahun 2023. Lonjakan ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun pendapatan sah lainnya. Peningkatan PAD ini dapat mencerminkan perbaikan dalam sistem pemungutan pajak daerah, peningkatan aktivitas ekonomi lokal, serta ekspansi basis pajak melalui regulasi yang lebih tertib dan efisien.

Dengan kapasitas fiskal yang semakin besar, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, listrik, pendidikan vokasi, dan pemberdayaan tenaga kerja. Belanja-belanja tersebut pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik daerah bagi investor domestik, karena infrastruktur dan pelayanan publik merupakan pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi investasi. Namun demikian, tingginya PAD belum tentu secara otomatis menjamin meningkatnya PMDN, sebab efektivitas belanja juga menjadi faktor kunci. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji apakah peningkatan PAD selama enam tahun terakhir di Jawa Timur secara nyata memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab hal tersebut melalui pendekatan empiris berbasis data tahunan.

Selain infrastruktur dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktor tenaga kerja juga memegang peranan penting dalam menentukan tingkat investasi di suatu

wilayah. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang secara langsung mempengaruhi proses kegiatan ekonomi. Menurut teori Human Capital yang dikemukakan oleh Schultz (1961), kualitas dan ketersediaan tenaga kerja yang memadai akan meningkatkan efisiensi produksi dan akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Daerah dengan tenaga kerja yang melimpah dan produktif cenderung lebih kompetitif dalam menarik investasi karena mampu menjamin ketersediaan sumber daya manusia untuk kegiatan industri dan kegiatan jasa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dalam grafik diatas, jumlah angkatan kerja di provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2016-2023. Pada tahun 2016, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,23 persen, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 68,78 persen pada tahun 2017. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik bekerja maupun sedang mencari pekerjaan.

Pada tahun 2018 dan 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja relatif stabil masing-masing sebesar 69,56 persen dan 69,61 persen. Namun, pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, angka partisipasi angkatan kerja justru sedikit meningkat menjadi 70,23 persen, meskipun kondisi perekonomian secara umum mengalami perlambatan. Hal ini menjadi 70,23 persen, meskipun kondisi perekonomian secara umum mengalami perlambatan. Hal ini merujuk bahwa sebagian besar masyarakat tetap berupaya untuk tetap terlibat dalam pasar kerja di tengah tekanan ekonomi.

Pada periode berikutnya yaitu di tahun 2021, terjadi sedikit penurunan

menjadi 70,00 persen, yang kemungkinan disebabkan oleh pembatasan aktivitas ekonomi dan belum pulihnya sektor-sektor padat karya. Meski demikian, setelah kondisi ekonomi mulai membaik, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) kembali meningkat menjadi 71,23 persen pada tahun 2022 dan terus meningkat hingga mencapai 72,56 persen pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, tren peningkatan TPAK di Jawa Timur selama delapan tahun terakhir mencerminkan adanya potensi tenaga kerja yang besar dan produktif. Ketersediaan tenaga kerja yang melimpah ini berpotensi menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor, karena menjamin ketersediaan sumber daya manusia untuk kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Dengan demikian, dinamika angkatan kerja menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam analisis pengaruh terhadap peningkatan investasi di Provinsi Jawa Timur.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kepercayaan dan aktivitas investasi oleh pelaku usaha lokal terhadap prospek ekonomi suatu daerah. Dalam kerangka pembangunan ekonomi, PMDN memegang peranan strategis karena berkontribusi langsung terhadap pembentukan modal tetap bruto, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi jangka menengah hingga panjang.

Tidak seperti Penanaman Modal Asing (PMA) yang kerap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti stabilitas global dan nilai tukar, PMDN lebih mencerminkan kondisi fundamental internal daerah, seperti ketersediaan infrastruktur, kapasitas fiskal, dan dinamika pasar lokal (Kuncoro, 2010).

Secara teori, investasi domestik memiliki hubungan erat dengan faktor-faktor struktural ekonomi daerah. Menurut teori neoklasik dan teori pertumbuhan

endogen, peningkatan investasi terjadi apabila terdapat dukungan terhadap produktivitas faktor produksi, efisiensi biaya, serta kepastian lingkungan usaha (Mankiw, 2020; Romer, 1990). Dalam konteks Jawa Timur, dukungan terhadap iklim investasi terus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi perizinan, penyediaan insentif fiskal serta pemberdayaan pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) aktif mendorong investor lokal untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor prioritas seperti industri pengolahan, energi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berdasarkan grafik yang kamu lampirkan, nilai PMDN di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, realisasi PMDN tercatat sekitar Rp40 triliun dan mengalami kenaikan yang cukup tajam hingga mencapai hampir Rp 70 triliun pada tahun 2023. Kenaikan ini menjadi bukti nyata bahwa daya tarik investasi domestik di Jawa Timur semakin menguat, sejalan dengan membaiknya fasilitas infrastruktur, peningkatan kapasitas fiskal, serta bertumbuhnya sektor-sektor usaha yang kompetitif. Selain itu, data ini juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha lokal terhadap efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Meskipun demikian, lonjakan investasi tidak selalu dapat diartikan sebagai hasil langsung dari peningkatan satu atau dua faktor saja. Investasi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor yang saling terkait. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian empiris guna mengetahui sejauh mana faktor-faktor seperti infrastruktur listrik, infrastruktur jalan, pendapatan asli daerah, dan TPAK benar-benar memberikan pengaruh terhadap nilai PMDN di

Provinsi Jawa Timur. Hasil dari kajian ini tidak hanya akan memperkaya literatur ekonomi pembangunan daerah, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan yang tepat sasaran dalam mendorong investasi domestik secara berkelanjutan.

Meskipun telah banyak kajian mengenai investasi di Indonesia, sebagian besar fokus penelitian terdahulu lebih menekankan pada pengaruh faktor makroekonomi nasional seperti suku bunga, inflasi, atau nilai tukar terhadap investasi secara agregat. Penelitian yang secara spesifik menyoroti bagaimana faktor-faktor internal daerah seperti infrastruktur, kapasitas fiskal, dan dinamika pelaku usaha lokal memengaruhi investasi dalam konteks wilayah tertentu terutama di tingkat provinsi yang masih tergolong terbatas. Padahal, dengan diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing provinsi memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola sumber daya dan merancang strategi pembangunan, termasuk dalam menarik penanaman modal dalam negeri (PMDN).

Studi-studi sebelumnya yang dilakukan di tingkat nasional atau lintas provinsi, seperti yang dilakukan oleh Fitriyani dan Fisabilillah (2022), umumnya menggunakan data agregat tanpa memperhatikan karakteristik lokal spesifik yang memengaruhi perbedaan pola investasi antarwilayah. Demikian pula, beberapa penelitian di Jawa Timur, meskipun ada yang mengkaji faktor investasi, cenderung hanya memfokuskan pada satu atau dua variabel tertentu, misalnya infrastruktur jalan atau tenaga kerja, tanpa mempertimbangkan kombinasi variabel ekonomi, fiskal, dan kelembagaan secara simultan.

Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian yang relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut secara komprehensif. Penelitian ini berusaha untuk

mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji pengaruh infrastruktur listrik, infrastruktur jalan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan TPAK terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) secara simultan, khususnya di Provinsi Jawa Timur selama periode 2018 hingga 2023. Keempat variabel tersebut dipilih karena mencerminkan empat dimensi utama daya saing daerah: dukungan infrastruktur energi, konektivitas fisik, kapasitas fiskal, dan dinamika pelaku ekonomi lokal. Pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi penelitian juga dilandasi oleh peran strategis provinsi ini dalam ekonomi nasional, tingginya kontribusi terhadap PDRB, dan beragamnya kondisi sosial ekonomi antar kabupaten/kota di dalamnya.

Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah, khususnya dalam merancang strategi pembangunan yang lebih terfokus pada penguatan faktor-faktor yang benar-benar berdampak terhadap peningkatan investasi domestik. Sementara dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi memperkaya khazanah ilmu ekonomi pembangunan daerah, khususnya dalam memahami interaksi antara pembangunan infrastruktur, kebijakan fiskal, pemberdayaan tenaga kerja, dan investasi lokal dalam konteks otonomi daerah.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, ia menguji kembali teori pertumbuhan endogen (Romer, 1990), teori lokasi (Weber, 1909), dan teori Keynesian investasi dalam konteks aktual daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang berbasis data serta sebagai bahan evaluasi efektivitas program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah Jawa Timur dalam upaya menciptakan iklim investasi yang lebih inklusif

dan kompetitif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, permasalahan yang diambil adalah :

1. Apakah Infrastruktur Listrik berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur?
2. Apakah Infrastruktur Jalan berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur?
4. Apakah Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh Infrastruktur Listrik terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur
2. Menganalisis pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur
3. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur
4. Menganalisis pengaruh Tingkat Partipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri di Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang di antaranya :

1. Manfaat bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Melalui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, hasil penelitian dapat membantu masyarakat memahami pentingnya infrastruktur yang memadai.
2. Manfaat bagi Universitas, penelitian ini akan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan pembangunan daerah, memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan teori dan praktik. Dengan menghasilkan penelitian yang relevan dan bermanfaat, universitas dapat meningkatkan reputasinya di kalangan akademisi dan masyarakat.
3. Manfaat bagi Peneliti, peneliti akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dalam analisis data dan metodologi penelitian melalui penelitian ini.